

'Aksi' Jokowi, Ahok dan Djarot

Tangani Pedagang Tanah Abang

Ramadhan Rizki Saputra , CNN Indonesia | Kamis, 09/11/2017 06:27 WIB



Jokowi, Ahok, dan Anies Baswedan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap para pedagang kaki lima di Tanah Abang. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Trotoar di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, penuh sesak, pada Selasa (7/11). Di ruas pedestrian itu, sejak pagi hingga sore hari para pejalan kaki 'dipaksa' berebut ruang dengan pedagang kaki lima dan lapak-lapak yang mereka gelar di sana.

Kondisi yang jauh dari kenyamanan itu diperparah dengan kesemrawutan arus lalu lintas di sekitarnya. Mobil dan motor tersendat dan mengular, dipicu oleh angkutan kota yang berhenti lama menunggu penumpang.

Gambaran kawasan Tanah Abang yang demikian semakin sering terlihat setelah Ahok tak lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hansyar, salah seorang pedagang kaki lima di trotoar Jalan Jatibaru Raya mengatakan, dirinya sengaja berjualan di atas trotoar bersama pedagang lain karena lebih mudah menarik pembeli dibandingkan menggelar lapak di dalam Pasar Tanah Abang.

"Iya, di sini (trotoar) kan lebih gampang cari pembeli, mas," ujarnya.

Lihat juga:

[Sandiaga Tuding Pejalan Kaki Penyebab Semrawut Tanah Abang](#)

Hansyar mengaku sudah sejak tahun 1990 berjualan minuman dan makanan di trotoar di sekitar Tanah Abang. Beberapa kali ia pindah-pindah lokasi berdagang hingga akhirnya menetap di trotoar Jalan Jatibaru Raya, sejak tahun 2000.

Ia sadar berdagang di trotoar tidak diperbolehkan. Tetapi Hansyar tak kuasa melanggarnya. Dia beralasan punya tanggung jawab menafkahi dua anaknya sehingga harus bekerja keras untuk mendapatkan pemasukan dari pembeli.

"Mau gimana lagi, mas, saya kan orang kecil, ada tanggung jawab buat keluarga juga," ungkapnya.

Hasyar melihat kesemrawutan PKL di Tanah Abang sudah terjadi sejak dahulu saat dirinya pertama kali berdagang di Tanah Abang.

Akan tetapi, saat Jokowi menjabat (2012-2014), Hansyar melihat ada perubahan terhadap PKL di sekitar Tanah Abang.



Pedagang pakaian yang berjualan di trotoar jalan di kawasan Tanah Abang. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)

Di era Jokowi keberadaan PKL lebih terkelola, salah satunya dengan cara merelokasi PKL ke Blok G Pasar Tanah Abang.

Para PKL yang berdagang di trotoar mendapatkan masing-masing jatah kios agar tak kembali berjualan di trotoar.

"Jadi enggak ada yang di trotoar," ujarnya.

Lihat juga:

[Curhat Pedagang Tanah Abang Diminta 'Uang Lapak'](#)

Ahok Galak

Perbedaan mencolok mulai terlihat ketika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggantikan Jokowi yang saat itu terpilih menjadi presiden.

Hansyar menyaksikan banyak PKL kembali menjajakan dagangannya di trotoar-trotoar sekitar Tanah Abang.

Ia mengungkapkan, salah satu masalah PKL kembali berjualan di trotoar karena Blok G sepi dari pembeli.

"Banyak teman yang mengeluh, di sana (Blok G) sepi, jadi jualan lagi di luar," ujarnya.

Keputusan PKL yang kembali berjualan di trotoar saat itu disikapi dengan sangat represif oleh Satpol PP.

Ia mengatakan bahwa hampir tiap hari Satpol PP selalu bersiaga di kawasan Tanah Abang untuk menertibkan pedagang.

"Zaman Ahok dulu enggak ada ampun, banyak yang diambilin barang-barangnya (dagangan) itu," katanya.

Lihat juga:

['Tidak Ada Preman di Tanah Abang'](#)

Perubahan cara pengelolaan kembali dirasakan Hansyar saat Djarot dan Anies Baswedan menjadi pemimpin ibu kota.

Sejak Djarot dan Anies, kata dia, kecemasan PKL mulai berkurang. Pendekatan Satpol PP juga lebih lunak dibandingkan saat zaman Gubernur Jokowi dan Ahok yang represif terhadap pedagang

"Sekarang kayaknya lebih halus ya kalau mau nertibin, udah ada informasi suruh nertibin sendiri gitu," ujarnya.



Situasi di Blok G, Tanah Abang, yang ditinggal para pedagang. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Pedagang lain, Ani, 55 tahun, salah satu orang yang mendapat kios di Blok G di era Jokowi, pada 2013 lalu. Tetapi ia mengaku tak lama berjualan di Blok G lantaran sepi pembeli.

"Saya sebentar di dalam (Blok G) habisnya sepi, saya jualan di sini (trotoar) lagi," kata Ani.

Lihat juga:

[Sandiaga: PKL Hadir di Tanah Abang karena Menyambung Nafkah](#)

Ani tetap mengapresiasi upaya Jokowi menata kawasan Tanah Abang, namun mengeluhkan saat Ahok menjabat sebagai gubernur.

Di era Ahok, kata Ani, pendekatan terhadap PKL tidak manusiawi. Hampir tiap hari Satpol PP melakukan penertiban mendadak.

Ia mengaku sering dikejar-kejar oleh Satpol PP hingga dagangannya tercecer di jalanan.

"Iya saat itu kan gubernurnya rada galak ya. Jadi razia terus, dikejar-kejar terus, mainnya harus umpet-umpetan," ungkapnya.

Razia Mudah Ditebak

Pengawasan yang lebih longgar mulai dirasakan sejak era Djarot dan Anies. Kata Ani, sejak era Djarot para pedagang mudah menebak rencana razia yang dilakukan Satpol PP.

Lihat juga:

[Lulung Ragukan Temuan Preman oleh Ombudsman di Tanah Abang](#)

Informasi soal razia seringkali bocor terlebih dulu ke para pedagang sehingga saat penertiban terjadi para pedagang menghilangkan jejak dagangannya.

Mereka baru kembali menggelar lapak usai razia.

"Iya ini udah biasa seperti itu mas, namanya juga cari uang," ujarnya.

Kegalakan Satpol PP juga semakin menghilang. Ini sesuai dengan pantauan *CNNIndonesia.com* yang menyaksikan para PKL membuka lapak dan menjajakan dagangannya di depan mobil Satpol PP yang terparkir di kawasan Jalan Jatibaru Raya.

(wis)